KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Komisi XI DPR sahkan 7 anggota badan suvervisi BI
Tanggal : Jumat, 07 Juli 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 10

Komisi XI DPR Sahkan 7 Anggota Badan Supervisi BI

KOMISI XI DPR kemarin mengesahkan tujuh anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) untuk periode 2023-2028. Mereka dinyatakan lolos dalam uji kepatutan dan kelayakan yang digelar dalam dua hari.

Ketujuh nama yang lolos itu ialah Irwan Lubis, Agus Herta Sumarto, M Khusaini, Iskandar Simorangkir, Muhammad Nawir Messi, Piter Abdullah Redjalam, dan Marwanto Harjowiryono.

Anggota BSBI periode 2023-2028 akan menggantikan keanggotaan periode 2020-2023 yang akan habis masa jabatannya pada Agustus 2023 mendatang.

Sebelumnya, masa jabatan keanggotaan BSBI adalah tiga tahun. Lama masa jabatan kemudian mengalami perubahan menjadi lima tahun seperti yang tertuang dalam UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan, salah satu peserta, Piter Abdullah Redjalam, mengusulkan penguatan pengawasan oleh DPR terhadap Bank Indonesia (BI) secara keseluruhan agar bank sentral mampu mencapai tujuannya.

"Pengawasan oleh DPR terhadap BI, menurut pendapat saya, mencakup seluruh fungsi dan tugas BI dalam upaya mencapai tujuan. BI memiliki tujuan yang sangat mulia. Karena itu, upaya untuk mencapai tujuan BI seharusnya menjadi lingkup pengawasan dari DPR, tidak hanya dibatasi dalam aspek operasional sebagaimana selama ini dilakukan," kata Piter.

Ia menjelaskan, pengawasan oleh DPR secara keseluruhan itu bukan berarti DPR mampu mengintervensi BI. Pengawasan itu sebatas kajian atas tata kelola dan efektivitas dari berbagai kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh BI selama ini.

"Pengawasan itu dilakukan terhadap kebijakan yang sudah diambil, bukan kebijakan yang masih dalam proses dibuat," jelas Piter.

Di uji kepatutan dan kelayakan itu, calon anggota BSBI lainnya, Muhammad Nawir Messi, mengatakan perlu adanya mekanisme konsultasi secara reguler antara BSBI dan DPR guna mendalami isu-isu yang terkait dengan BI. Menurutnya, saat ini relasi antara BSBI dan DPR masih bersifat struktural.

"Saya ingin mendorong peran BSBI yang lebih relevan. Saya mengusulkan agar dibangun mekanisme konsultasi reguler antara BSBI dan DPR, baik formal maupun informal, dalam rangka mendiskusikan secara reguler, rutin, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia," kata Nawir. (Ant/E-2)